

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi memiliki arti kedaulatan berada ditangan rakyat, dengan menjamin hak-hak rakyat secara adil, sehingga kebebasan dan peluang dalam pemerintah diberi seluas-luasnya kepada masyarakat. Berdasarkan pandangan Abraham Lincoln (1863), Lincoln memuji kebaikan-kebaikan dari apa yang di sebut sebagai ‘pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’.¹ Artinya setiap orang yang ada dalam negara demokrasi berhak memilih dan dipilih atau memimpin dan dipimpin, dengan mengikuti pemilihan atau konflik politik secara damai tanpa takut politik balas dendam terhadap pesaing perebutan kekuasaan. Untuk mewujudkan demokrasi bisa dilakukan melalui pemilihan.

Pemilihan merupakan agenda wajib dalam negara demokrasi, karena pemilihan sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan secara berkala, sebagai rotasi pergantian kekuasaan atas dasar pilihan publik. Rakyat membentuk partai politik, Partai politik yaitu sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan, melalui sarana pilih atau yang lain.

Pemilihan ini terdiri dari dua macam yaitu secara langsung dan tidak langsung, dikatakan langsung artinya partisipasi warga secara langsung, tanpa perantara, dan terus-menerus dari warga di dalam tugas-tugas pemerintah, sedangkan yang tidak langsung atau perwakilan dan terbatas dalam arti partisipasi

1 Andrew Heywood. (2014)., *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 153

masyarakat dalam pemerintahan bersifat jarang dan singkat, dibatasi pada aksi pemberian suara tiap beberapa tahun sekali. Di katakan tidak langsung dalam arti masyarakat tidak menyelenggarakan kekuasaan mereka sendiri, mereka sebatas memilih orang-orang yang akan berkuasa untuk kepentingan masyarakat.²

Indonesia ialah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem politiknya termasuk menjalankan pemerintahannya. Hal ini telah dijalankan sejak Indonesia merdeka, sebagai wujud dari demokrasi tersebut maka dilakukan pemilihan pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang diselenggarakan dengan Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representituante*) Daftar Tertutup (tidak langsung).³ Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pergulatan hebat dari rezim ke rezim berikutnya, Soekarno dengan secara sepihak membubarkan dewan konstituante melalui Dekrit 5 Juli 1959 dan DPR melalui Perpres No. 3 Tahun 1960.

Era Reformasi juga sebagai peluang perubahan kembali pemerintahan di Indonesia. Pengkajian ulang desentralisasi sebagai wujud adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan. Pemerintah pusat diberikan wewenang mengelola ditingkat pusat dan tidak boleh mencampuri urusan otonomi di berbagai daerah. Pemerintah daerah juga diberikan hak otonom mengatur daerahnya, termasuk dalam proses sirkulasi pemerintahan yang di kenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi, walikota dan wakil walikota ditingkat kota serta bupati dan wakil bupati ditingkat

2 *Ibid.*, hal. 158

3 Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo, hal. 115

kabupaten. Mengikuti kesuksesan Pemilu 2004, Pilkada tahun 2005 juga dilaksanakan secara langsung berdasarkan konsep *one man one vote*⁴

Lalu, demokrasi yang dilaksanakan pada pemilu langsung ataupun tidak langsung diperlukannya partisipasi politik dari masyarakat, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.⁵

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan masyarakat pada pilkada. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi.

4 Muhamam Labolo, *Op.,cit*, h. 174

5 Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Ikrar Mandriabadi, hal. 367

Pada sejarah Pemilu-pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan Pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu legitimasi yang kuat atau rendah.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran untuk ikut mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat, di tegaskan pada UU. No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 8 ayat (1) huruf q. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilihan Komisi Pemilihan Umum membutuhkan sebuah strategi untuk dapat menjalankan tugasnya.

Di Sumatera Selatan KPU provinsi melakukan upaya penyelenggaraan terbesar pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera. Karena dilakukan secara serentak mulai dari pemilihan gubernur hingga pemilihan kepala daerah sembilan kabupaten kota se Sumatera Selatan. Secara rasional, Pilkada Serentak di Sumatera Selatan yang dilaksanakan di 17 kabupaten/kota dengan rincian, 12 daerah digelar tahun 2018. Kemudian Pilkada kabupaten/kota digelar 2018 dan 52 akan dilaksanakan 2019.⁷ Upaya yang di lakukan KPU masih banyak belum diketahui masyarakat.

Dalam demokrasi satu orang satu suara sangat penting, baik orang di perjalanan, orang sakit, panyandang disabilitas, orang pinggiran dan yang lainnya. Karena suara sangat berharga menentukan legitimasi, sehingga penyelenggara

6 KPU Provinsi Sumatera Selatan, *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: KPU Provinsi Sumatera Selatan, hal. 1

7 KPU Provinsi Sumatera Selatan, (2018), "Mengukir Sejarah Kepemimpinan Sumatera Selatan", Edis VI, Palembang: KPU Sumsel, h. 37

pemilu KPU harus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Karena demokrasi di tentukan oleh suara rakyat, dan sangat berkaitan dengan legitimasi “*semakin sedikit yang memilih semakin rendah legitimasi, semakin banyak yang memilih semakin tinggi legitimasi.*” Legitimasi sangat penting karena legitimasi awal dari segala-galanya dalam proses pelaksanaan kekuasaan dari pemimpin. Pemimpin yang di akui dan tidak di akui sangat beda karena itu berkaitan dengan power kekuasaan politik, legitimasi berdampak dengan *pertama* kekuasaan politik, karena kekuasaan politik pemimpin rendah akan mengakibatkan kewenangan atau kebijakan dari pemimpin tersebut membuat masyarakat biasa saja tidak ada apresiasi dari masyarakat.

Kedua berdampak kepada kepada negara, contoh kita tidak mengakui Gubernur Sumatera Selatan yang sekarang berarti kita juga tidak mengakui Provinsi Sumatera Selatan. Pemimpin yang tidak diakui berdampak luas sampai membuat masalah seperti manipulasi, korupsi dan hal buruk lain. Hal tersebut terjadi karena pemimpin itu tidak di hargai oleh bawahannya sehingga membuat bawahan berbuat seenaknya saja. Tingkat partisipasi masyarakat sangat penting untuk legitimasi pemimpin, karena kalau rendahnya partisipasi masyarakat membuat pemimpin tidak legitimasi sehingga sangat berdampak buruk bagi semua sistem pelaksanaan pemerintahan pemimpin tersebut.

Dari kenyataan tersebut, maka dilakukan untuk mengetahui apa dan bagaimana upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Hal ini yang

mendasari peneliti sehingga berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang **“Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ?
2. Bagaimana tanggapan KPU dan masyarakat terhadap Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui tanggapan KPU Provinsi dan masyarakat terhadap Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik. Diharapkan mampu menjadikan acuan dalam penelitian di masa depan terkait berlangsungnya demokrasi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai perluasan mengenai demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan lebih bisa meningkatkan lagi partisipasi politik masyarakat pada Pemilu, KPU harus mencari strategi lebih baik untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu kedepannya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

Tauchid Noor dalam “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum”. Penelitian ini

menjelaskan bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum merupakan metamorfosis dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan peran KPU sesuai dengan wewenang yang ada maka KPU harus menjalankan perannya dalam pemilu sesuai undang-undang yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dan stakeholder. Dalam interaksi sosial tersebut terdapat peran yang signifikan terhadap partisipasi. Adapun peran KPU yang diimplementasikan dalam pemilu tersebut sebagai berikut antara lain⁸ :

- a. Mengadakan sosialisasi dengan menggunakan media komunikasi multi jalur pada setiap tahapannya secara tepat, baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui forum-forum organisasi nonformal dalam masyarakat, misalnya radio, koran, kelompok tahlil, pengajian, ibu-ibu PKK, dan sebagainya.
- b. Fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional di tingkat kelurahan, misalnya dengan memberdayakan lembaga tingkat desa kelurahan, seperti desa kelurahan, RW, dan RT.
- c. Mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu/pemerintah dan pemerintah daerah, media massa, dan instansi

8 Tauchid Noor, *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, 2019, hal. 59

terkait di daerah, dengan kerja sama dan koordinasi tersebut diharapkan terjadi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

- d. Konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga KPU dapat menempatkan dirinya secara netral, independen, proporsional, dan patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga KPU dapat menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

M. Yusuf A.R dalam “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”. Skripsi atau jurnal ini menjelaskan peran KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. KPU secara undang-undang memiliki wewenang untuk menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat.⁹

Untuk menjalankan tugas di bidang 12 sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Pada wilayah provinsi terdapat KPU Provinsi, di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD kabupaten/kota, di tingkat wilayah Kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia pemungutan Suara).

Pada saat pemungutan suara, di tiap-tiap TPS terdapat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sedangkan untuk pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri). Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan

9 M. Yusuf A.R, (2010), *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 4, No, 1, hal 13

untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Nicolas Hariyanto dalam “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹⁰ :

1. Analisis visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Utara Isu dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Adapun komponen-komponen S-W-O-T dalam KPU Provinsi Sumatera Utara adalah;
 - a. Strength (S), yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah memiliki SDM yang mencukupi; memiliki regulasi; dan memiliki anggaran yang memadai.
 - b. Weakness (W), yang menjadi kelemahan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah tidak adanya divisi khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi politik.

¹⁰ Nicolas Hariyanto, (2018), *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 96

- c. Opportunity (O), yang menjadi peluang KPU Provinsi Sumatera Utara adalah pemanfaatan teknologi informasi dan bekerjasama dengan 9 universitas dan SMA di Sumatera Utara.
- d. Threat (T), yang menjadi ancaman di KPU Provinsi Sumatera Utara adalah apatisme masyarakat dan daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

2. Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dirumuskan menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi. Alternatif-alternatif strategi tersebut yaitu:

- a. Strategi S.O dengan kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Selain itu SDM di KPU juga dituntut untuk melek teknologi sehingga dapat menggunakan media sosial sebagai peluang untuk penyebaran informasi secara luas. Disamping itu anggaran yang dimiliki KPU dapat digunakan secara efektif dengan melakukan kerjasama bersama 9 universitas dan SMA di Sumatera Utara sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat
- b. Strategi S.T dengan kombinasi kekuatan dan ancaman yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa KPU untuk meminimalisir tingkat apatisme masyarakat dengan meningkatkan kinerja kelompok peduli pemilu. Kelompok peduli pemilu ini melakukan pendidikan politik

kepada kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok lainnya. Dibentuknya Kelompok peduli pemilu ini akan dapat mengefisienkan waktu dan dana KPU sebab kelompok ini yang akan melakukan sosialisasi kepada beberapa kelompok masyarakat.

- c. Strategi W.O untuk meminimalisir tidak adanya divisi khusus yang membidangi partisipasi masyarakat dan sosialisasi masyarakat KPU menggunakan peluang yang ada yaitu memaksimalkan kinerja kelompok peduli pemilu, kelompok ini sebagai perpanjangan tangan KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan untuk menunjang agar sosialisasi semakin efektif KPU juga memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai alat sosialisasi yang efektif, lalu SDM yang ada di KPU juga dapat di mobilisasi untuk terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
- d. Strategi W.T merupakan strategi yang bersifat defensif dan ditunjukan untuk meminimalkan kelemahan. Ada 2 strategi yaitu meningkatkan koordinasi anggota KPU untuk meningkatkan parmas dan meningkatkan peran PPDP sebagai petugas pencocokan dan penelitian “coklit”.

3. Terdapat 3 bentuk kegiatan yang dilakukan KPU sebagai bentuk strategi meningkatkan partisipasi masyarakat.

- a. Forum Warga

KPU turun langsung kepada masyarakat ditingkat RT/RW untuk memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, tidak lagi hanya mengundang tokoh

masyarakat dan menugaskannya memberikan sosialisasi. Cara ini diharapkan dapat memperkecil sifat apatisme masyarakat di tingkat RT/RW.

b. Komunitas Peduli Pemilu

Komunitas ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok perempuan, tenaga pengajar, disabilitas dan lain sebagainya. Orang-orang yang terdiri dari komunitas ini diharapkan membentuk komunitas lagi di sekitar wilayahnya atau dengan kelompoknya dan memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dan masyarakat sekitar.

c. Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar pemilu ini dibentuk untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk belajar bagaimana sejarah terbentuknya KPU, tata cara pelaksanaan pemungutan suara, dan informasi seputar kepemiluan. Dirumah pintar pemilu juga terdapat contoh alat kelengkapan memilih, maket-maket dan alat peraga lainnya. Rumah pintar pemilu ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh kelompok maupun perseorangan. Penyediaan fasilitas pembelajaran kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan.

d. Ceramah oleh Komisioner KPU pada Saat Upacara

Komisioner KPU tingkat Kab/Kota setiap senin memberikan ceramah kepada para siswa/siswi pada saat upacara, ceramah yang diberikan menyinggung tentang

kepemiluan, diharapkan para siswa dapat memahami sedari dini tentang kepemiluan dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

e. memaksimalkan media sosial untuk sosialisasi

KPU untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media sosial. Banyaknya pengguna aktif media sosial menjadi latar belakang KPU memakai media sosial untuk menyebarkan informasi terkait kepemiluan. Penggunaan media sosial juga dapat menghemat biaya sosialisasi.

f. KPU melakukan kerjasama dengan universitas dan SMA yang ada di Sumatera Utara, kerjasama ini berbentuk membebaskan biaya fasilitas dan narasumber jika organisasi di Universitas atau SMA mengadakan acara yang bertema kepemiluan. Dibalik pembebasan tersebut KPU dapat memanfaatkan peluang untuk memberikan pendidikan politik bagi siswa ataupun mahasiswa dan memberikan sosialisasi kepemiluan

Maya Yuliantina dalam “Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹¹ :

Tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan persentase hasil analisis data masih di tingkatan atau indikator pengetahuan yakni 29,3%. Masyarakat mengetahui kesadaran politik persentase masyarakat dalam indikator pemahaman, 32,3% masyarakat tidak memahami kesadaran politik, di tingkatan selanjutnya 43,4%

11 Maya Yuliantina, (2016), *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 178

masyarakat cukup cukup memiliki kesadaran politik, lalu 48,4% masyarakat tidak mempunyai tindakan dalam kesadaran politik. Nilai rata-rata yang dihasilkan untuk kesadaran politik adalah 2,57 yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan Persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran politik maka dapat dikategorikan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimen rendah.

Novendi Setiawan dalam “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut¹²:

1. Perencanaan strategi KPU Bantul dengan cara pertama identifikasi misi KPU Bantul, yang kedua analisis lingkungan strategi dengan analisis SWOT, dan yang ketiga analisis isu strategi.
2. Hasil analisis isu strategi berdasarkan SWOT sebagai berikut : Strategi S.O (Strength / Opportunities) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari luar anggota KPU, menjalankan tugas KPU sesuai dengan undangundang yang berlaku serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan berteknologi internet. Dengan strategi tersebut KPU dapat memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mengejar peluang yang ada. Strategi S.T (Strengths / Threats) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul , meningkatkan pendidikan berpolitik kepada masyarakat dan

12 Novendi Setiawan, (2015), *Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mengefektifitaskan kinerja tim yang bertugas dalam seksi sosialisasi masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar. Strategi W.O (Weaknes / Opportunities) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkan kerjasama dari organisasiorganisasi terkait, pemanfaatan sarana dan prasarana dengan baik agar biaya bisa diminimalisir, mengadakan pelatihan atau diklat agar sosialisasi lebih berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi W.T (Weakness / Thereats) yang didapat dari hasil analisis kekuatan dan peluang organisasi KPU Bantul yaitu meningkatkankoordinasi anggota KPU untuk bersosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan program KPU dengan meminimalkan biaya, meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat.

3. Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dipilkada 2015 antara lain : Memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, Meningkatkan kerjasama dari organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan Validasi Data Pemilih

E. Kerangka Teori

Konsep Legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan) yang paling penting dalam sistem politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut di

hormati. Legitimasi biasanya akan terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat berdasarkan putusan dalam peradilan, di mana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran bagaimana keputusan tersebut diterima dan diakui *kesahinannya* di dalam masyarakat luas.

Adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa memicu kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut juga dipercaya dapat membuka kesempatan yang semakin lebar bagi pemerintahan untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang akan ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan itu sendiri yang pada umumnya menjadi tugas utama dari sebuah pemerintahan. Untuk memahami konsep legitimasi dapat ditinjau yaitu teori legitimasi yaitu sebagai berikut :

a. Teori Legitimasi Max Waber

”Rule without legitimacy is fundamentally not rule, but rather a stage in the mere exercise of power with little prospect of permanence. And so the state also requires a legitimating foundation that can provide validity for its order”¹³

“Aturan tanpa legitimasi secara fundamental bukanlah aturan, melainkan sebuah tahapan pelaksanaan kekuasaan semata dengan sedikit prospek keberlanjutan. Maka negara membutuhkan legitimasi sebagai dasar bagi pembenaran kekuasaan dan tatananya”

Legitimasi adalah pemerintahan dari rakyat dan dipilih oleh rakyat dan kemudian digunakan untuk rakyat. Dengan kata lain, legitimasi berkaitan erat dengan proses sosial, beda halnya dengan legalitas yang berhubungan dengan aspek hukum. Proses pemilihan akan menentukan apakah pemimpin yang

13 Andreas Anter, (2014), *Max Weber Theory Of The Modern State*, Terjemahan edisi jerman: Badan Lisensi Hk Cipta, hal 52

terpilih memenuhi unsur legalitas dan legitimasi. Pemilu tidak hanya bertujuan memilih pemimpin politik, proses itu tidak hanya menjadi pintu masuk untuk proses pembangunan politik dan demokrasi selanjutnya. Selain sebagai tolok ukur perkembangan demokrasi pemilu juga menguji daya legitimasi seseorang yang menjadi pemimpin di hari esok.

b. Legitimasi Kekuasaan

Sebagaimana diungkapkan Haryanto dalam Nursam bahwa kekuasaan dapat diartikan Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa wewenang (*authority*) merupakan sebuah kekuasaan formal, atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.¹⁴

Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang

14 *Ibid.*, hal. 20

dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.

Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan. Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan hak yang mengikat masyarakat ataukah tidak. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

c. Legitimasi Demokrasi

Pembahasan-pembahasan modern tentang legitimasi didominasi oleh hubungan dengan demokrasi, begitu dominan sehingga legitimasi demokrasi sekarang secara luas diterima sebagai satu-satunya bentuk legitimasi yang bermakna. Klaim sebuah organisasi politik di anggap absah karenanya secara

instrinsik dikaitkan dengan klaim bahwa dia demokrasi. Bagian utama berikut mengkaji model-model kekuasaan demokratis dan debat-debat tentang bagaimana demokrasi berjalan dalam praktiknya.

Sifat dari hubungan demokrasi dan legitimasi, Demokrasi dapat di anggap mendukung demokrasi ada 3 cara. *Pertama*, melalui persetujuan. Meski pun warga tidak secara eksplisit memberikan persetujuan mereka untuk diperintah, yang memberi otoritas politik sebuah 'hak memerintah' yang formal, mereka melakukannya secara implisit tiap kali mereka berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, demokrasi menyokong legitimasi dengan memperluas kesempatan-kesempatan bagi partisipasi politik, yang paling penting melakukan aksi voting, dan juga melalui aktivitas-aktivitas seperti bergabung dalam partai politik atau kelompok kepentingan atau terlibat dalam protes atau demonstrasi.

Partisipasi politik, dalam pengertian ini mengikat pemerintah dan rakyat, mendorong rakyat untuk melihat aturan-aturan main politik sebagai absah dan menerima bahwa mereka memiliki sebuah kewajiban untuk menghormati dan mematuhi perintah.

Kedua, esensi dari pemerintahan demokratis adalah sebuah proses kompromi, konsiliasi dan negosiasi, melalui mana berbagai kepentingan dan kelompok mendapatkan cara untuk hidup bersama dalam keadaan relatif damai, daripada saling bersaing dengan menggunakan kekuatan dari senjata. *Ketiga*, demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan-balik yang cenderung mendukung stabilitas politik jangka-panjang, karena ia membuat 'output' dari pemerintahan

politik selaras dengan 'input' atau tekanan atau tuntutan yang dikenakan kepadanya.

Bahkan meskipun demokrasi telah diterima sebagai mekanisme utama dalam menyokong legitimasi, terdapat alasan untuk menganggap bahwa efektivitasnya tidak tentu. Ini terlihat dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan-pemilihan dan menurunnya keanggotaan dalam partai-partai politik.

Dari beragam konsep diatas, dapat disimpulkan rumusan dari legitimasi bahwa konsep legitimasi berkaitan dengan konsep kekuasaan dan kewenangan yang menekankan hubungan antar pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, titik tekanan dari legitimasi adalah keabsahan. Keabsahan disini selalu diartikan sebagai sifat normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan berarti legitimasi selalu berkaitan dengan sikap masyarakat

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori legitimasi tersebut, penelitian berjudul Upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, akan di teliti menggunakan Teori Legitimasi Max Weber, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan Upaya KPU Provinsi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat penting untuk memelihara legitimasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 merupakan penelitian dengan tipe penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang termasuk survei dan pencarian fakta pertanyaan dari enis yang berbeda dan tujuan dari penelitian ini ialah menggambarkan keadaan seperti yang terjadi saat ini, sehingga penelitian tidak memiliki kontrol atau variabel tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi.¹⁵ Penelitian ini akan diteliti dengan melakukan pengelohan, penyajian dan analisi data yang di peroleh dari lapangan mengenai Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Dalam bidang penelitian terdapat dua macam pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah Pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau intepretasi individu (informal) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya¹⁶.

Letak kualitatif dalam penelitian ini dimana upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk

15 C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, hal. 2-3

16 Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 10

meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur Sumatera Selatan tahun 2019, sehingga terdapat tanggapan masyarakat terhadap upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan. Melalui pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan data dari upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan melihat tanggapan masyarakat terhadap upaya KPU Provinsi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, Selanjutnya menggambarkan, dan menganalisis hasil dari Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan pemilu 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data dan jenis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam Upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, seperti anggota KPU Sumatera Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, ibu-ibu, dan panitia penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini, data

primer yang digunakan adalah dokumen, foto, rekaman pernyataan, dan lainnya yang berhubungan dengan Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang bagi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita online, laporan-laporan, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, untuk memperkuat dan menunjang data primer tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah KPU Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat di Sumatera Selatan yang berfokus pada pemilu Sumatera Selatan 2018, dengan demikian yang menjadi perhatian ialah orang-orang yang terlibat dalam Upaya KPU Provinsi dalam Meningkatkan Partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Oleh karena itu, subjek penelitian yang merupakan bagian dari upaya KPU Provinsi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, dan ibu-ibu ada sasaran partisipasi dan sosialisasi pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis sebuah objek apapun yang ingin diobservasi, dilakukan dengan terjun langsung dilapangan sehingga diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁷ Peneliti langsung terjun kelapangan yang terlibat langsung dan dengan upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan samapai mengetahui pada tingkat mana partisipasi masyarakat dalam upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terjun langsung ke lapangan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan langsung menemui warga yang ikut berpartisipasi untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden)¹⁸. Peneliti menemui orang-orang yang terlibat langsung dalam Upaya KPU Provinsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum marginal, penyandang disabilitas, mahasiswa, ibu-ibu, dan panitia penyelenggara pemilu ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan dari informan yang diwawancara.

17 *Ibid.*, hal. 175

18 *Ibid.*, hal. 362

Setelah melakukan wawancara responden kemudian penelitian akan mengamati dan obserparsi terhadap informasi atau keterangan yang didapatkan dari masing-masing responden.

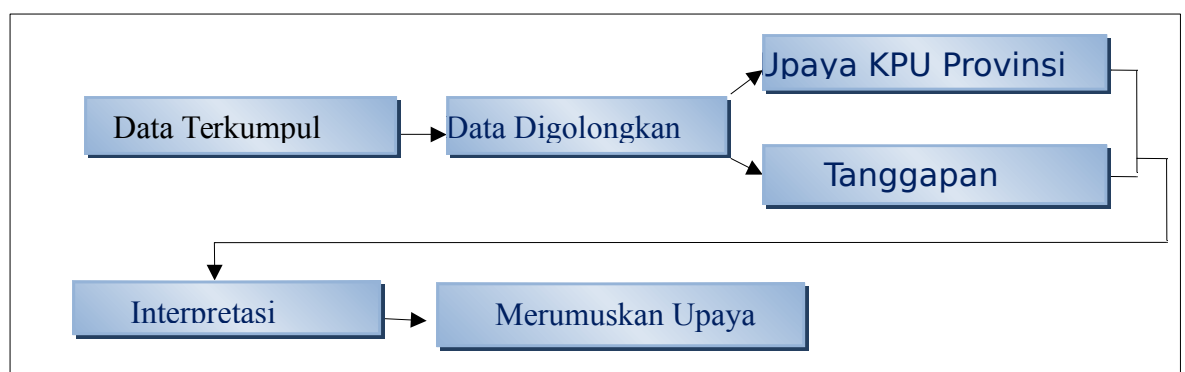
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.¹⁹ Dokumen yang di keluarkan langsung oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang berbentuk, modul, jurnal, laporan, foto, dan lainnya. Dokementasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Bagan 1.1

Teknik Pengumpulan Data



Sumber: Diolah Peneliti

19 Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 240

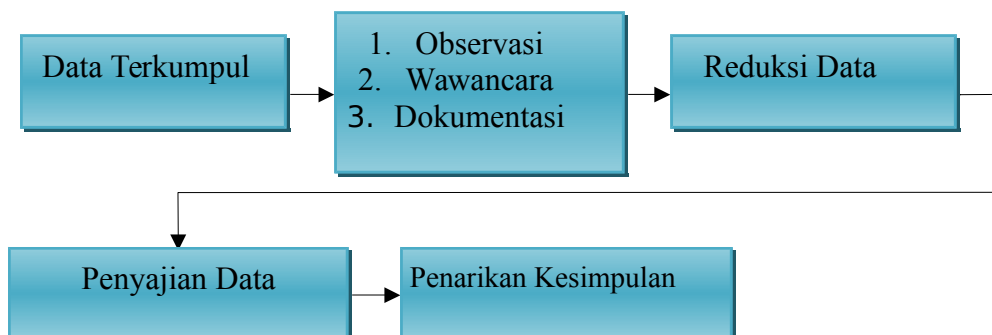
5. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat di hitung dan berwujud sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.

Disamping itu, penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisis dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Bagan 1.2

Teknik Analisa Data



6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

Bab II: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran dari lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III: Analisis Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Hasil dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, data dan informasi di analisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu

berisikan saran-saran yang akan diharapkan memberi manfaat bagi lembaga yang terkait juga kepada penulis.